



**MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 546 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kapasitas organisasi, dan mempercepat pencapaian tujuan strategis nasional dipandang perlu menambah Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota yang terdiri dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; dan
- b. bahwa untuk penambahan pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6264);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020);
6. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan yang Dapat Diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 65);
7. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 218);
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1197 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional yang Dapat Diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 386 Tahun 2023 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Secara Nasional Tahun Anggaran 2023.

- Memperhatikan : 1. Surat Menteri Keuangan Nomor S-290/MK.02/2023 tanggal 10 April 2023;
2. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 24438/B-BP.02.01/SD/K/2022 tanggal 29 Juli 2022;
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2901/B/HK.04.01/2023 tanggal 24 Mei 2023 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2023;
4. Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Tahun 2023 Nomor PT.01.03/F/1365/2023 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi (STR) dalam Rangka Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Kesehatan;
5. Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 200/I/HK/2023 tanggal 5 Juni 2023 tentang Kualifikasi Pendidikan dalam Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Formasi Jabatan Fungsional Peneliti.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Kabupaten/Kota dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Masa Perjanjian Kerja bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja paling singkat 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja.
- KETIGA : Kualifikasi pendidikan bagi Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2901/B/HK.04.01/2023 tanggal 24 Mei 2023 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2023.
- KEEMPAT : Kualifikasi pendidikan bagi Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan pada Instansi Pemerintah merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Tahun 2023 Nomor PT.01.03/F/1365/2023 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi (STR) dalam Rangka Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Kesehatan.
- KELIMA : Kualifikasi pendidikan bagi Jabatan Fungsional Peneliti pada Instansi Pemerintah merujuk pada Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 200/I/HK/2023 tanggal 5 Juni 2023 tentang Kualifikasi Pendidikan dalam Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Formasi Jabatan Fungsional Peneliti.
- KEENAM : Pelaksanaan pengisian penetapan kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara tersebut, dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 20 Juli 2023

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR  
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA,



ABDULLAH AZWAR ANAS

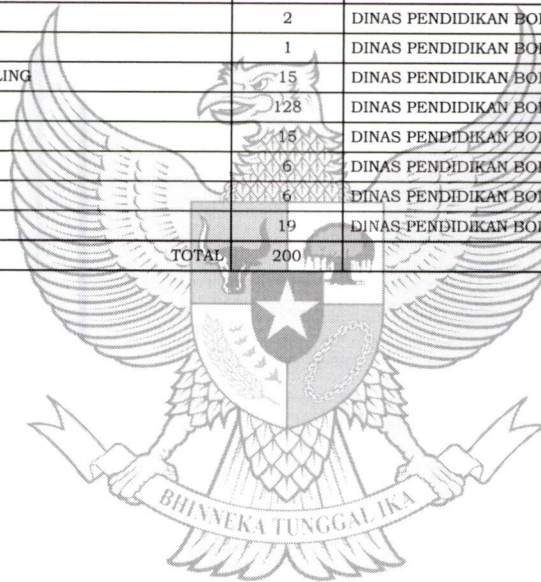


LAMPIRAN CCCX  
 KEPUTUSAN MENTERI  
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 DAN REFORMASI BIROKRASI  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 596 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI  
 APARATUR SIPIL NEGARA DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN  
 2023

RINCIAN PENETAPAN KEBUTUHAN APARATUR SIPIL NEGARA  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023

TENAGA GURU

NO.	JABATAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
1.	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA HINDU	2	DINAS PENDIDIKAN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
2.	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	4	DINAS PENDIDIKAN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
3.	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KATOLIK	2	DINAS PENDIDIKAN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
4.	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KRISTEN	2	DINAS PENDIDIKAN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
5.	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA	1	DINAS PENDIDIKAN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
6.	AHLI PERTAMA - GURU BIMBINGAN KONSELING	15	DINAS PENDIDIKAN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
7.	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	128	DINAS PENDIDIKAN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
8.	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	15	DINAS PENDIDIKAN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
9.	AHLI PERTAMA - GURU PPKN	6	DINAS PENDIDIKAN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
10.	AHLI PERTAMA - GURU SENI BUDAYA	6	DINAS PENDIDIKAN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
11.	AHLI PERTAMA - GURU TIK	19	DINAS PENDIDIKAN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
	TOTAL	200	



panrb

KEMENTERIAN  
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 DAN REFORMASI BIROKRASI

LAMPIRAN CCCX  
 KEPUTUSAN MENTERI  
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 DAN REFORMASI BIROKRASI  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 546 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI  
 APARATUR SIPIL NEGARA DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN  
 2023

RINCIAN PENETAPAN KEBUTUHAN APARATUR SIPIL NEGARA  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023

TENAGA KESEHATAN

NO.	JABATAN	ALOKASI PPPK	KODE FASKES	UNIT PENEMPATAN
1.	AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS PATOLOGI KLINIK	1	28727	RSUD BOLAANG MONGONDOW SELATAN
2.	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	2	24538	PUSKESMAS ADOW
3.	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	5	28727	RSUD BOLAANG MONGONDOW SELATAN
4.	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	2	24537	PUSKESMAS DUMAGIN
5.	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	2	24536	PUSKESMAS PINOLOSIAN
6.	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	2	55314	PUSKESMAS SINOMBAYUGA
7.	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	2	24535	PUSKESMAS DUMINANGA
8.	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	4	24534	PUSKESMAS MOLIBAGU
9.	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	2	24533	PUSKESMAS MILANGODAA
10.	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	1	30957	PUSKESMAS ONGGUNOI
11.	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	3	24532	PUSKESMAS MOMALIA
12.	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	10	462	DINAS KESEHATAN KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN
13.	AHLI PERTAMA - APOTEKER	1	24534	PUSKESMAS MOLIBAGU
14.	AHLI PERTAMA - APOTEKER	1	462	DINAS KESEHATAN KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN
15.	AHLI PERTAMA - APOTEKER	1	55314	PUSKESMAS SINOMBAYUGA
16.	AHLI PERTAMA - APOTEKER	1	30957	PUSKESMAS ONGGUNOI
17.	AHLI PERTAMA - APOTEKER	3	28727	RSUD BOLAANG MONGONDOW SELATAN
18.	AHLI PERTAMA - BIDAN	2	24533	PUSKESMAS MILANGODAA
19.	AHLI PERTAMA - BIDAN	2	55314	PUSKESMAS SINOMBAYUGA
20.	AHLI PERTAMA - BIDAN	2	24536	PUSKESMAS PINOLOSIAN
21.	AHLI PERTAMA - BIDAN	2	24532	PUSKESMAS MOMALIA
22.	AHLI PERTAMA - BIDAN	2	24534	PUSKESMAS MOLIBAGU
23.	AHLI PERTAMA - BIDAN	1	24538	PUSKESMAS ADOW
24.	AHLI PERTAMA - BIDAN	1	28727	RSUD BOLAANG MONGONDOW SELATAN
25.	AHLI PERTAMA - DOKTER	1	24532	PUSKESMAS MOMALIA
26.	AHLI PERTAMA - DOKTER	1	24533	PUSKESMAS MILANGODAA
27.	AHLI PERTAMA - DOKTER	1	28727	RSUD BOLAANG MONGONDOW SELATAN
28.	AHLI PERTAMA - DOKTER	1	55314	PUSKESMAS SINOMBAYUGA
29.	AHLI PERTAMA - DOKTER	1	24537	PUSKESMAS DUMAGIN
30.	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	1	24537	PUSKESMAS DUMAGIN
31.	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	1	24534	PUSKESMAS MOLIBAGU
32.	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	1	24533	PUSKESMAS MILANGODAA
33.	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	1	24538	PUSKESMAS ADOW
34.	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	1	24532	PUSKESMAS MOMALIA
35.	AHLI PERTAMA - ENTOMOLOG KESEHATAN	1	24537	PUSKESMAS DUMAGIN
36.	AHLI PERTAMA - ENTOMOLOG KESEHATAN	1	462	DINAS KESEHATAN KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN
37.	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	1	24534	PUSKESMAS MOLIBAGU
38.	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	2	462	DINAS KESEHATAN KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN
39.	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	1	24533	PUSKESMAS MILANGODAA
40.	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	1	55314	PUSKESMAS SINOMBAYUGA

TENAGA KESEHATAN

NO.	JABATAN	ALOKASI PPPK	KODE FASKES	UNIT PENEMPATAN
41.	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	1	24535	PUSKESMAS DUMINANGA
42.	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	1	24538	PUSKESMAS ADOW
43.	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	1	24537	PUSKESMAS DUMAGIN
44.	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	1	55314	PUSKESMAS SINOMBAYUGA
45.	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	1	24538	PUSKESMAS ADOW
46.	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	1	24535	PUSKESMAS DUMINANGA
47.	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	1	28727	RSUD BOLAANG MONGONDOW SELATAN
48.	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	1	462	DINAS KESEHATAN KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN
49.	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	1	24537	PUSKESMAS DUMAGIN
50.	AHLI PERTAMA - PENATA ANESTESI	1	28727	RSUD BOLAANG MONGONDOW SELATAN
51.	AHLI PERTAMA - PERAWAT	2	30957	PUSKESMAS ONGGUNOI
52.	AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	1	28727	RSUD BOLAANG MONGONDOW SELATAN
53.	AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	1	24532	PUSKESMAS MOMALIA
54.	AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	1	24535	PUSKESMAS DUMINANGA
55.	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	2	24533	PUSKESMAS MILANGODAA
56.	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	3	24534	PUSKESMAS MOLIBAGU
57.	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	2	28727	RSUD BOLAANG MONGONDOW SELATAN
58.	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	1	30957	PUSKESMAS ONGGUNOI
59.	AHLI PERTAMA - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	1	462	DINAS KESEHATAN KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN
60.	AHLI PERTAMA - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	2	24532	PUSKESMAS MOMALIA
61.	AHLI PERTAMA - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	1	24535	PUSKESMAS DUMINANGA
62.	AHLI PERTAMA - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	1	28727	RSUD BOLAANG MONGONDOW SELATAN
63.	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	2	24533	PUSKESMAS MILANGODAA
64.	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	2	24532	PUSKESMAS MOMALIA
65.	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	3	28727	RSUD BOLAANG MONGONDOW SELATAN
66.	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	1	24538	PUSKESMAS ADOW
67.	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	1	24536	PUSKESMAS PINOLOSAN
68.	TERAMPIL - BIDAN	4	24532	PUSKESMAS MOMALIA
69.	TERAMPIL - BIDAN	10	28727	RSUD BOLAANG MONGONDOW SELATAN
70.	TERAMPIL - BIDAN	7	24534	PUSKESMAS MOLIBAGU
71.	TERAMPIL - BIDAN	1	24536	PUSKESMAS PINOLOSAN
72.	TERAMPIL - BIDAN	2	24535	PUSKESMAS DUMINANGA
73.	TERAMPIL - BIDAN	1	55314	PUSKESMAS SINOMBAYUGA
74.	TERAMPIL - BIDAN	3	24533	PUSKESMAS MILANGODAA
75.	TERAMPIL - BIDAN	2	24538	PUSKESMAS ADOW
76.	TERAMPIL - NUTRISIONIS	2	24534	PUSKESMAS MOLIBAGU
77.	TERAMPIL - NUTRISIONIS	3	30957	PUSKESMAS ONGGUNOI
78.	TERAMPIL - NUTRISIONIS	3	24532	PUSKESMAS MOMALIA
79.	TERAMPIL - NUTRISIONIS	1	28727	RSUD BOLAANG MONGONDOW SELATAN
80.	TERAMPIL - PERAWAT	2	24536	PUSKESMAS PINOLOSAN
81.	TERAMPIL - PERAWAT	1	55314	PUSKESMAS SINOMBAYUGA
82.	TERAMPIL - PERAWAT	4	24537	PUSKESMAS DUMAGIN
83.	TERAMPIL - PERAWAT	1	24535	PUSKESMAS DUMINANGA
84.	TERAMPIL - PERAWAT	6	30957	PUSKESMAS ONGGUNOI
85.	TERAMPIL - PERAWAT	5	24534	PUSKESMAS MOLIBAGU



TENAGA KESEHATAN

NO.	JABATAN	ALOKASI PPPK	KODE FASKES	UNIT PENEMPATAN
86.	TERAMPIL - PERAWAT	3	24538	PUSKESMAS ADOW
87.	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	1	30957	PUSKESMAS ONGGUNOI
88.	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	1	24534	PUSKESMAS MOLIBAGU
89.	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	1	24532	PUSKESMAS MOMALIA
90.	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	1	24533	PUSKESMAS MILANGODAA
91.	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	1	28727	RSUD BOLAANG MONGONDOW SELATAN
92.	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	1	24538	PUSKESMAS ADOW
93.	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	1	30957	PUSKESMAS ONGGUNOI
94.	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	1	24537	PUSKESMAS DUMAGIN
95.	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	1	55314	PUSKESMAS SINOMBAYUGA
96.	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	1	24534	PUSKESMAS MOLIBAGU
97.	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	1	24533	PUSKESMAS MILANGODAA
98.	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	1	24532	PUSKESMAS MOMALIA
99.	TERAMPIL - RADIOGRAFER	1	28727	RSUD BOLAANG MONGONDOW SELATAN
100.	TERAMPIL - TEKNISI ELEKTROMEDIS	1	28727	RSUD BOLAANG MONGONDOW SELATAN
101.	TERAMPIL - TEKNISI TRANSFUSI DARAH	3	28727	RSUD BOLAANG MONGONDOW SELATAN
102.	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	1	24535	PUSKESMAS DUMINANGA
103.	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	1	462	DINAS KESEHATAN KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN
104.	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	1	24536	PUSKESMAS PINOLOSIAN
105.	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	1	24538	PUSKESMAS ADOW
106.	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	1	24537	PUSKESMAS DUMAGIN
107.	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	1	24532	PUSKESMAS MOMALIA
108.	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	1	24533	PUSKESMAS MILANGODAA
109.	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	1	55314	PUSKESMAS SINOMBAYUGA
110.	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	2	30957	PUSKESMAS ONGGUNOI
111.	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	3	28727	RSUD BOLAANG MONGONDOW SELATAN
112.	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	1	55314	PUSKESMAS SINOMBAYUGA
113.	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	1	30957	PUSKESMAS ONGGUNOI
114.	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	1	24534	PUSKESMAS MOLIBAGU
115.	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	1	24538	PUSKESMAS ADOW
TOTAL		203		

panrb

KEMENTERIAN  
PENDEKATAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI

LAMPIRAN CCCX  
 KEPUTUSAN MENTERI  
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 DAN REFORMASI BIROKRASI  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 546 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI  
 APARATUR SIPIL NEGARA DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN  
 2023

RINCIAN PENETAPAN KEBUTUHAN APARATUR SIPIL NEGARA  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
1.	AHLI PERTAMA - ANALIS HUKUM	S-1 ILMU HUKUM;D-IV ILMU HUKUM	1	BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT , BAGIAN HUKUM
2.	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 HUKUM;S-1 MANAJEMEN;S-1 MANAJEMEN SDM;S-1 PSIKOLOGI ANAK;S-1 ANAK USIA DINI;S-1 SOSIAL BUDAYA	1	BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , BIDANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK
3.	AHLI PERTAMA - ANALIS KETAHANAN PANGAN	S-1 ILMU PERTANIAN;S-1 ILMU PANGAN;S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN;S-1 ILMU GIZI/GIZI MASYARAKAT;S-1 TEKNOLOGI PANGAN;S-1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN;S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN	2	BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KETAHANAN PANGAN , BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN
4.	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	S-1 ILMU MANAJEMEN;D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 MANAJEMEN BISNIS;D-IV MANAJEMEN BISNIS;D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA APARATUR;D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR;D-IV POLITIK PEMERINTAHAN;S-1 MANAJEMEN PEMERINTAHAN;D-IV MANAJEMEN PEMERINTAHAN;D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN;S-1 ADMINISTRASI NEGARA;S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 ILMU MANAJEMEN;S-1 MANAJEMEN	1	BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN ADMINISTRASI UMUM , BAGIAN ORGANISASI
5.	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	D-IV STUDI KEBIJAKAN PUBLIK;D-IV MANAJEMEN BISNIS;D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA APARATUR;D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR;D-IV MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA SEKTOR PUBLIK;D-IV POLITIK PEMERINTAHAN;D-IV MANAJEMEN PEMERINTAHAN;D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN;D-IV MANAJEMEN INFORMATIKA;D-IV TEKNOLOGI REKAYASA INFORMASI PEMERINTAHAN;D-IV ADMINISTRASI NEGARA;S-1 ADMINISTRASI NEGARA;S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA;S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK;S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 ILMU MANAJEMEN;S-1 MANAJEMEN BISNIS;S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA;S-1 POLITIK DAN PEMERINTAHAN;S-1 TEKNIK INFORMATIKA	1	BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN , SEKRETARIAT DAERAH , BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA , BIDANG MANAJEMEN SDM APARATUR
6.	AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN	S-1 ARSITEKTUR;S-1 TEKNIK ARSITEKTUR;D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG;S-1 ARSITEKTUR LANSKAP;S-1 DESAIN INTERIOR;S-1 TEKNIK ELEKTRO;S-1 TEKNIK SIPIL;D-IV ARSITEKTUR	1	BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN , BIDANG PERUMAHAN
7.	AHLI PERTAMA - PENATA PENANGGULANGAN BENCANA	S-1 ILMU ADMINISTRASI;D-IV ILMU ADMINISTRASI;S-1 MANAJEMEN BENCANA;D-IV MANAJEMEN BENCANA;S-1 TEKNIK LINGKUNGAN;D-IV TEKNIK LINGKUNGAN;S-1 SOSIOLOGI;D-IV SOSIOLOGI;S-1 PLANOLOGI;D-IV PLANOLOGI;S-1 ARSITEKTUR;D-IV ARSITEKTUR;S-1 MANAJEMEN;D-IV MANAJEMEN;S-1 GEOGRAFI;D-IV GEOGRAFI;S-1 TEKNIK SIPIL;S-1 PSIKOLOGI;S-1 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL;S-1 ILMU HUKUM;S-1 TEKNIK GEOLOGI;S-1 STATISTIK;S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN;D-IV EKONOMI PEMBANGUNAN;S-1 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT	1	BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN , SEKRETARIAT DAERAH , BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH , BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK

TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
8.	AHLI PERTAMA - PENATA RUANG	S-1 PLANOLOGI;S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA;S-1 PERENCANAAN WILAYAH;S-1 PENGEMBANGAN WILAYAH DAN KOTA;S-1 ARSITEKTUR;S-1 GEOGRAFI LINGKUNGAN;S-1 GEOGRAFI DAN ILMU LINGKUNGAN;S-1 TEKNIK GEOMATIKA;S-1 TEKNIK GEODESI;S-1 TEKNIK GEODESI DAN GEOMATIKA;S-1 TEKNIK SIPIL;S-1 SISTEM KOMPUTER;S-1 TEKNIK KOMPUTER;S-1 TEKNIK INFORMATIKA;S-1 KOMUNIKASI PEMBANGUNAN;S-1 KOMUNIKASI MASSA	1	BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG , BIDANG CIPTA KARYA
9.	AHLI PERTAMA - PENATA RUANG	S-1 PLANOLOGI;S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA;S-1 PERENCANAAN WILAYAH;S-1 PENGEMBANGAN WILAYAH DAN KOTA;S-1 ARSITEKTUR;S-1 GEOGRAFI LINGKUNGAN;S-1 GEOGRAFI DAN ILMU LINGKUNGAN;S-1 TEKNIK GEOMATIKA;S-1 TEKNIK GEODESI;S-1 TEKNIK GEODESI DAN GEOMATIKA;S-1 TEKNIK SIPIL;S-1 SISTEM KOMPUTER;S-1 TEKNIK KOMPUTER;S-1 TEKNIK INFORMATIKA;S-1 KOMUNIKASI PEMBANGUNAN	1	BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG , BIDANG TATA RUANG
10.	AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL;S-1 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL;S-1 SOSIAL EKONOMI PERIKANAN;S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN;S-1 PENDIDIKAN IPS;S-1 TADRIS IPS;S-1 PEMBANGUNAN SOSIAL;S-1 ANTROPOLOGI SOSIAL;S-1 ADMINISTRASI BISNIS;S-1 PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN;S-1 EKONOMI;S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN;S-1 PENDIDIKAN EKONOMI;S-1 ILMU EKONOMI;S-1 MANAJEMEN EKONOMI;S-1 HUKUM;S-1 ILMU POLITIK;S-1 ADMINISTRASI NEGARA;S-1 PSIKOLOGI;S-1 ILMU KOMUNIKASI;S-1 PENDIDIKAN AKUNTANSI	1	BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA , BIDANG PENATAAN DESA
11.	AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN	S-1 PENYULUH PERTANIAN;S-1 PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN;S-1 AGROBISNIS;S-1 AGRONOMI;S-1 AGROTEKNOLOGI;S-1 BUDIDAYA PERTANIAN;S-1 HAMA PENYAKIT TUMBUHAN;S-1 ILMU TANAH;S-1 MANAJEMEN AGROBISNIS;S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA LAHAN;S-1 MEKANISASI PERTANIAN;S-1 PEMULIAAN TANAMAN;S-1 PETERNAKAN;S-1 PERKEBUNAN;S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN;S-1 PROTEKSI TANAMAN;S-1 TANAMAN PANGAN;D-IV PENYULUH PERTANIAN;D-IV AGROBISNIS HORTIKULTURA	27	BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERTANIAN , BIDANG PRASARANA, SARANA DAN PENYULUHAN
12.	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 SEMUA JURUSAN;D-IV SEMUA JURUSAN	2	BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN , SEKRETARIAT DAERAH , BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH , BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
13.	AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK;D-IV ADMINISTRASI PUBLIK;S-1 BROADCASTING;D-IV BROADCASTING;S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL;D-IV DESAIN KOMUNIKASI VISUAL;S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL;D-IV HUBUNGAN INTERNASIONAL;S-1 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL;S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT;D-IV HUBUNGAN MASYARAKAT;S-1 ILMU HUBUNGAN MASYARAKAT;D-IV ILMU HUBUNGAN MASYARAKAT;S-1 KOMUNIKASI HUBUNGAN MASYARAKAT;D-IV KOMUNIKASI HUBUNGAN MASYARAKAT;S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA;S-1 ILMU KOMUNIKASI;D-IV ILMU KOMUNIKASI;S-1 ILMU POLITIK;S-1 JURNALISTIK;D-IV KOMUNIKASI INFORMASI PUBLIK;S-1 ILMU PEMERINTAHAN	1	BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN ADMINISTRASI UMUM , BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN



## TENAGA TEKNIS

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN
14.	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 ILMU KOMPUTER;S-1 SISTEM KOMPUTER;S-1 TEKNIK KOMPUTER;S-1 INFORMATIKA;D-IV TEKNIK INFORMATIKA;S-1 TEKNIK INFORMATIKA;S-1 ILMU INFORMATIKA;S-1 SISTEM INFORMASI;D-IV SISTEM INFORMASI;S-1 TEKNOLOGI INFORMASI;S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI;S-1 REKAYASA PIRANTI LUNAK;D-IV MANAJEMEN INFORMATIKA	1	BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN , SEKRETARIAT DAERAH , BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH , BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
15.	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	D-IV MANAJEMEN INFORMATIKA;S-1 INFORMATIKA;S-1 ILMU KOMPUTER;S-1 ILMU INFORMATIKA;S-1 SISTEM KOMPUTER;S-1 TEKNIK KOMPUTER;S-1 TEKNOLOGI KOMPUTER;D-IV TEKNIK INFORMATIKA;S-1 SISTEM INFORMASI;S-1 TEKNOLOGI INFORMASI;S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI;S-1 REKAYASA PIRANTI LUNAK;S-1 SAINS DATA	1	BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA , BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK
16.	TERAMPIL - OPERATOR SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	D-III SISTEM INFORMASI;D-III TEKNIK KOMPUTER;D-III TEKNOLOGI KOMPUTER;D-III DEMOGRAFI DAN PENCATATAN SIPIL	1	BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL , BIDANG PIAK DAN PEMANFAATAN
17.	TERAMPIL - PARAMEDIK VETERINER	D-III AGROBISNIS PETERNAKAN;D-III BUDIDAYA PETERNAKAN;D-III KEAHLIAN PARAMEDIK VETERINER;D-III KESEHATAN HEWAN;D-III MANAJEMEN USAHA PETERNAKAN;D-III PARAMEDIK VETERINER;D-III PRODUKSI TERNAK;D-III PENYULUH PETERNAKAN;D-III TEKNISI MEDIS VETERINER	1	BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN , BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
18.	TERAMPIL - PENYULUH PERTANIAN	D-III PENYULUH PERTANIAN;D-III PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN;D-III AGROBISNIS;D-III AGRONOMI;D-III AGROTEKNOLOGI;D-III BUDIDAYA PERTANIAN;D-III HAMA PENYAKIT TUMBUHAN;D-III MANAJEMEN AGROBISNIS;D-III MANAJEMEN SUMBER DAYA LAHAN;D-III MEKANISASI PERTANIAN;D-III PEMULIAAN TANAMAN;D-III PERKEBUNAN;D-III PROTEKSI TANAMAN;D-III TEKNIK PERTANIAN;D-III TANAMAN PANGAN	4	BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERTANIAN , BIDANG PRASARANA, SARANA DAN PENYULUHAN
19.	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III TEKNOLOGI KOMPUTER;D-III TEKNIK KOMPUTER;D-III SISTEM INFORMASI;D-III TEKNOLOGI INFORMASI;D-III MANAJEMEN INFORMATIKA;D-III TEKNIK INFORMATIKA	2	BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN , SEKRETARIAT DAERAH , BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA , BIDANG MANAJEMEN SDM APARATUR
20.	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III TEKNOLOGI KOMPUTER;D-III TEKNIK KOMPUTER;D-III SISTEM INFORMASI;D-III TEKNOLOGI INFORMASI;D-III MANAJEMEN INFORMATIKA;D-III TEKNIK INFORMATIKA	1	BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN , SEKRETARIAT DAERAH , BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA , BIDANG PENGEMBANGAN SDM APARATUR
21.	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III TEKNOLOGI KOMPUTER;D-III TEKNIK KOMPUTER;D-III SISTEM INFORMASI;D-III TEKNOLOGI INFORMASI;D-III MANAJEMEN INFORMATIKA;D-III TEKNIK INFORMATIKA	1	BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN , SEKRETARIAT DAERAH , BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH , BIDANG ANGGARAN
TOTAL			53	

KEMENTERIAN  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI